

Upaya Pemerintah dalam Memopulerkan Kehidupan Budaya di Medan Pasca Kemerdekaan, 1945-1959

Government Efforts to Popularize Cultural Life in Post-Independence Medan, 1945-1959

Bryna Rizkinta^{1✉}, Fauzan Syahru Ramadhan², Ahmad Fauzan Baihaqi³

^{1✉ 2 3} Universitas Diponegoro

E-mail: brynarizkinta@lecturer.undip.ac.id[✉], fauzanuzan@lecturer.undip.ac.id,
ahmadfauzanbaihaqi25@lecturer.undip.ac.id

Diterima: 6 September 2024

| Direvisi: 21 November 2024

| Diterbitkan: 30 November 2024

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Art,
Medan,
Cultural Life.

Promoting national culture has been a task for the Indonesian government since the achievement of national independence and the ratification of the 1945 constitution. This writing focuses on the realization of the newly established government in realizing the promotion of national culture and popularizing cultural life, especially in the arts field, in Medan. This study uses historical methods consisting of topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study explain that although the government's role was minimal at that time, these efforts still existed and were visible. Programs from the Culture Bureau and the Ministry of PP and K, such as held art competitions and exhibitions, showed that. The government also provided financial assistance to groups of active artists in Medan, such as ASRI 45 and Jajasan Budaja.

Kata Kunci:

Seni,
Medan,
Kehidupan Budaya.

Memajukan kebudayaan nasional merupakan tugas bagi pemerintah Indonesia sejak dicapainya kemerdekaan nasional dan disahkannya UUD 1945. Penulisan ini berfokus pada realisasi pemerintah yang baru berdiri dalam mewujudkan kebudayaan nasional sekaligus memopulerkan kehidupan budaya, khususnya dalam bidang seni, di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pada masa ini peran pemerintah masih sangat kecil namun usaha-usaha tersebut tetap ada dan terlihat. Program dari Jawatan Kebudayaan dan Kementerian PP dan K seperti mengadakan sayembara seni rupa dan pameran menunjukkan hal tersebut. Pemerintah juga memberikan bantuan materiil kepada kelompok seniman aktif di Medan seperti ASRI 45 dan Jajasan Budaja.

PENDAHULUAN

Salah satu misi dari pemerintah yang baru berdiri setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah meningkatkan dan memajukan seni dan budaya. Hal tersebut tertulis dalam UUD 1945

yang telah diresmikan sehari setelah kemerdekaan. Pasal 32 yang berbunyi bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" menjadi pedoman dalam mengembangkan kebudayaan di Indonesia .

Dalam Sejarah Pemikiran dan Kebudayaan (HP, Safwan, Latuconsina, & Samsurizal, 1986, hlm. 34) yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendeskripsikan usaha memajukan kebudayaan Indonesia dilakukan dengan membina dan mengembangkan kebudayaan asli yang memiliki nilai luhur, selain juga menerima kebudayaan asing yang sesuai untuk Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah merupakan bahan-bahan untuk pembentukan kebudayaan nasional. Pada masa awal kemerdekaan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memajukan kebudayaan meliputi bidang-bidang seperti kesenian, bahasa, kepubakalaan, dan permuseuman.

Ketika masa kolonialisme, akses terhadap kehidupan seni modern, baik itu seni rupa, musik, ataupun pertunjukan dipopulerkan oleh salah satunya oleh *kunstkring* (lingkar seni). Namun, perkumpulan ini didominasi oleh kalangan Eropa dan elite pribumi dan hampir tidak menyisakan ruang bagi orang-orang biasa. Perkumpulan ini berdiri di kota-kota modern kolonial seperti *Bataviasche Kunstkring* di Batavia, *Bandoengsche Kunstkring* di Bandung, ataupun *Delische Kunstkring* di Medan dan menjadi ruang bagi kelompok elite kota dalam menikmati kebudayaan dan kesenian Eropa. Meskipun begitu, perkumpulan ini cukup penting dalam perkembangan kesenian di Indonesia karena perannya yang menjadi penghubung antara tren kesenian di Eropa dengan tanah kolonial. Hanya sedikit yang dapat melakukan kegiatan di *kunstkring* bagi para pribumi. Salah satunya adalah S.Sudjojono dan kelompok seniman pribumi yang didirikannya pada 1938 yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi). Mereka dapat melakukan pameran di gedung

kunstkring di tahun-tahun menjelang keruntuhan Hindia, pada 1941 (A. Burhan, 2008, hlm. 77).

Akses terhadap kesenian sangat sempit hingga kedatangan Jepang pada 1942. Kritikus seni Kusnadi (1990, hlm. 93) mengatakan bahwa kedatangan Jepang memiliki arti yang sangat penting meskipun hanya tiga tahun. Sebab pada masa itu seniman Indonesia diberikan kesempatan untuk berkembang dalam berbagai bidang seperti seni rupa, drama, musik, dan tari. Keimin Bunka Shido, lembaga kebudayaan Jepang, juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan para perupa Indonesia.

Berbeda dengan di Jawa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perkembangan seni, perkembangan seni modern Medan berada di pinggiran dalam perkembangan seni rupa bahkan setelah kemerdekaan. Sejak masa kolonial, *kunstkring* di Medan, yaitu *Delische Kunstkring* sangat eksklusif bagi elite kolonial kulit putih ataupun para tuan kebun. Kementerian Penerangan dalam Propinsi Sumatra (1953) mendeskripsikan tentang kondisi kesenian di Sumatra Utara bahwa bahkan setelah kembalinya kekuasaan Republik Indonesia kembali (1950) belum ada kemajuan dalam bidang kesenian. Hal tersebut dijelaskan karena kurangnya perhatian dari pemerintah.

Meski begitu, bukan berarti kehidupan seni rupa modern di Medan sama sekali tidak ada. Kota ini pada masa kolonial telah menjadi tempat orang-orang di berbagai daerah untuk berhijrah akibat perkembangan bisnis perkebunan. Beberapa penggerak kehidupan seni rupa Medan sebelum kemerdekaan adalah seniman-seniman yang berasal dari Sumatra Barat yang berhijrah ke Medan seperti Nawi Butun, Ismail Suleiman, dan Sutan Buyung. Meskipun begitu

seni bukanlah hal yang menjadi populer bagi rakyat, hal tersebut disebabkan karena kondisi penjajahan yang tengah di alami oleh masyarakat (Ekoprawoto, Hartini, & Mulyono, 2007, hlm. 20).

Telah terdapat pembahasan mengenai perkembangan kesenian setelah kemerdekaan. Agus Burhan (2013) membahas perkembangan seni rupa bukan hanya dalam bidang estetika namun juga sosial dari masa kependudukan Jepang hingga masa Lekra. Spanjaard (2018) membahas perkembangan seni rupa Indonesia dalam jangka panjang mulai dari zaman kolonial, kemerdekaan, hingga pada akhir abad ke-20. Dalam pembahasannya dalam “Kreasi Sebuah Identitas Indonesia” Spanjaard menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam memopulerkan seniman dan kesenian dalam lingkup nasional.

Dalam pembahasan secara khusus di Medan, terdapat Marije Plomp (2012) yang membahas tentang kehidupan budaya populer di Medan. Plomp mendeskripsikan bahwa hampir keseluruhan kehidupan budaya di Medan adalah budaya populer yang diproduksi dan dikonsumsi oleh massa seperti film, cerita ringan, dan hanya sedikit masyarakat medan yang berpartisipasi dalam kebudayaan nasional modern yang “serius” seperti seni rupa ataupun sastra. Plomp juga melihat bahwa pengaruh kehidupan budaya di Medan lebih dipengaruhi oleh pengaruh dunia Melayu transnasional seperti Singapura dan Malaysia dari pada Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional. Pembahasan mengenai kehidupan budaya di Medan ditulis juga oleh Mehaga (2012) dalam skripsinya yang

membahas tentang kontribusi Lekra dalam perkembangan kehidupan budaya di Medan.

Berbeda dengan penulisan sebelumnya yang berfokus pada budaya massal dan peran organisasi kesenian dalam kehidupan budaya di Medan. Tujuan penulisan ini membahas tentang dorongan pemerintah terhadap komunitas seniman dan serta peran yang pemerintah lakukan dalam memajukan kehidupan budaya pada masa awal kemerdekaan demi menciptakan kebudayaan nasional yang dicita-citakan. Penulisan ini menitik beratkan pada perspektif perkembangan seni rupa. Namun, tidak menghiraukan tentang kesenian yang lain seperti sastra ataupun musik agar dapat memperoleh gambaran umum tentang kehidupan seni di awal kemerdekaan. Hal tersebut menarik untuk dibahas karena pemerintah Indonesia ketika itu baru berdiri dan kondisi ekonomi di tengah dan setelah juga memengaruhi modal pemerintah untuk melaksanakan program untuk memopulerkan semangat dan kesadaran berkebudayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang Kuntowijoyo (2018) jabarkan terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang telah melalui tahap kritik dan kemudian digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku, surat kabar sezaman, dan artikel ilmiah. Sumber primer yang digunakan adalah buku *Propinsi Sumatra Utara* (1953) yang diterbitkan oleh pemerintah. Buku tersebut mencatat tentang segala aspek kehidupan di Sumatra Utara sampai pada tahun diterbitkannya. Selain itu juga terdapat sumber

surat kabar, yaitu *Het Nieuwsblad* yang merupakan surat kabar orang Belanda hasil gabungan dari *De Sumatra Post* dan *Deli Courant* pada masa kolonial. Sumber sekunder yang digunakan adalah buku *Sejarah Seni Rupa Sumatra Utara* (2007) serta *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (1986).

Kemudian dalam tahap interpretasi, yang menurut Kuntowijoyo sebagai biang subjektivitas, analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahwa peran pemerintah dalam kehidupan budaya merupakan bentuk realisasi dalam memajukan kebudayaan nasional. Selain penjelasan dari Pasal 32, menurut sastrawan Boejoeng Saleh (1956, hlm. 244) kebudayaan nasional yang sedang dicita-citakan tersebut disebut merupakan kebudayaan akulturatif dan sinkretis. Kebudayaan tersebut sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemuda terpelajar pada 1920-an di mana kebudayaan memadukan unsur-unsur dari nilai dan norma Barat dengan unsur-unsur asli dari berbagai kebudayaan daerah di seluruh Indonesia. Mengenai konsep operasional dari “memajukan kebudayaan nasional”, terdapat pandangan dari Amri Marzali (2014, hlm. 262), yaitu “daya atau kapabilitas dari unsur-unsur intelektual, emosional, dan spiritual bangsa Indonesia yang berfungsi meningkatkan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Dengan begitu program yang dapat memajukan kebudayaan Indonesia dapat dirancang (*planned*), diubah (*revised*), dan direkayasa (*modifiable*) melalui kebijakan publik (*cultural policy*). Dapat dilihat bahwa memajukan kebudayaan nasional adalah program yang dirancang dan direncanakan pemerintah dengan berbagai strategi, dalam konteks Medan awal

kemerdekaan, diantaranya dengan memberikan bantuan dana kepada seniman dan kelompok seniman pribumi. Tahapan yang terakhir adalah historiografi di mana penulis menuliskan hasil dari keseluruhan proses tahapan di atas secara kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Seniman dengan Pemerintah di Pusat Kekuasaan Republik

Kondisi sosial dan politik dalam revolusi kemerdekaan memberikan pandangan nasionalisme terhadap para seniman Indonesia. Terdapat kerja sama antar seniman dan para pejuang membuat bukan hanya melahirkan karya-karya bertema perjuangan, lebih jauh lagi, para seniman juga turut terlibat dalam propaganda-propaganda perang seperti poster anti Belanda hingga turut bergabung dalam pasukan gerilya. Karya-karya seperti *Kawan-Kawan Revolusi* (1947) karya Sudjojono, serta *Laskar Mengatur Siatat* (1946) karya Affandi merupakan beberapa karya yang dapat dibilang mewakili zaman ini (M. A. Burhan, 2004, hlm. 27).

Pada masa ini seniman-seniman mendirikan kelompok-kelompok seni di berbagai daerah. Affandi yang pindah ke Yogyakarta pada 1946 mendirikan Seniman Masyarakat yang kemudian berganti nama menjadi Seniman Indonesia Muda (SIM) yang kemudian dipimpin oleh Sudjojono. Kelompok ini mengadakan latihan melukis bersama bagi para anggotanya seperti Affandi, Hendra Gunawan, Sudarso, Trubus, Dullah, Kartono Yudokusumo, Basoeki Resobowo, Rusli, Harjadi, Suromo, Surono, Abdul Salam, D. Joes, dan Zaini. Di tahun selanjutnya, pada 1947, berdiri perkumpulan seniman dengan nama Pelukis Rakyat dengan anggotanya yang

merupakan mantan SIM. Terdapat juga perkumpulan bernama Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang selain melakukan kursus menggambar juga membuat poster-poster (Kusnadi, 1990, hlm. 94).

Kerjasama paling awal adalah dengan kelompok seni yang bernama Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah, khususnya pada Jawatan Penerangan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Dr. Soebandrio. Kelompok ini membuat poster-poster propaganda dan ditempelkan di jalan-jalan kota (Banindro, 2019, hlm. 70). Pada 1947 SIM bersama dengan Biro Perjuangan Kementerian Pertahanan mengadakan pameran besar-besaran yang menampilkan karya-karya seniman muda bertemakan perjuangan (M. A. Burhan, 2013, hlm. 25). Pada masa ini perkembangan seni lukis dibantu oleh peran pemerintah.

Di tengah suasana revolusi dan konflik internal bangsa pada 1948. Seniman-seniman dan intelektual bersama dengan pemerintah menyelenggarakan Kongres Kebudayaan untuk pertama kalinya setelah kemerdekaan di Pendopo Kabupaten Magelang pada 20 sampai 24 Agustus. Para pemimpin-pemimpin republik yang hadir antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Mr. Ali Sastroamidjojo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri Penerangan Moh. Natsir, Sekretaris Negara Mr. Iksan, dan Panglima Besar Sudirman (Supardi, 2013, hlm. 75,78).

Mr. Wongsonegoro, sebagai Ketua Kongres menjelaskan bahwa mengembangkan kebudayaan dalam rangka menyelesaikan perjuangan dan revolusi serta terdapatnya krisis

kebudayaan menjadi alasan diadakannya kongres tersebut. Perihal krisis kebudayaan, Mr. Ali menyebutkan hal itu terjadi akibat kondisi Indonesia yang tengah dalam revolusi. Hasil dari Kongres Kebudayaan dalam bidang lembaga kebudayaan adalah sepakatnya membentuk Lembaga Kebudayaan Indonesia, mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan Akademi Kesenian, serta membentuk Kementerian Kebudayaan tersendiri (Supardi, 2013, hlm. 77,82). Setelah Kongres Budaya Pertama pada 1948, kongres selanjutnya diadakan pada 1952, selanjutnya kongres rutin dilakukan hingga sekarang beberapa tahun sekali. Kongres Kebudayaan menjadi penting dalam perkembangan seni dan budaya karena merupakan tempat bertemunya para intelektual dan seniman dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional pada akhir 1949 dengan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar in Den Haag, kesenian tidak lagi menjadi instrumen perjuangan revolusi. Menurut Spanjaard (2018, hlm. 163) setelah revolusi, perhatian berfokus pada pembangunan Indonesia. Dalam mengembangkan kesenian, beberapa akademi kesenian didirikan pada tahun-tahun ini. Untuk mengembangkan bidang seni musik pada 1952 didirikan Sekolah Musik Indonesia di Yogyakarta dengan jurusan piano, tiup, vokal, gesek, dan perkusi. Pada 1950 didirikan Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta untuk melestarikan serta mengembangkan tradisi karawitan (HP dkk., 1986, hlm. 81). Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) secara resmi didirikan pada 15 Januari 1950 oleh Mangunsarkoro

sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan merupakan bagian dari realisasi dari hasil Kongres Kebudayaan 1948 (Spanjaard, 2018, hlm. 164).

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1978, hlm. 37) ASRI didirikan dengan tujuan menampung cita-cita guru gambar dan pelukis di Yogyakarta. Mereka mencita-citakan tentang terbukanya kesempatan belajar yang luas bagi angkatan muda seniman Indonesia yang berbakat. Di dalam akademi para pelajar mendapatkan materi-materi yang tidak dapat belum mendapatkan perhatian di sanggar-sanggar seni seperti teori estetika, sejarah kebudayaan, ataupun ilmu psikologi.

Selain pendidikan formal, upaya-upaya mengembangkan kesadaran seni dan budaya juga dilakukan dengan publikasi majalah. Terdapat dua majalah seni dan budaya yang terbit pada 1950-an yaitu Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan dilanjutkan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia. Majalah ini berisikan tentang artikel-artikel mengenai seni lukis, musik, cerita pendek, dan puisi. Selain Indonesia terdapat majalah Budaya yang diterbitkan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (Spanjaard, 2018, hlm. 186–187).

Dapat dibilang bahwa agenda untuk memopulerkan serta mengembangkan kesadaran atas kehidupan budaya merupakan bentuk dari pembangunan nasional (nation-building) bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Terlebih lagi bila berkaitan dengan seni rupa modern, di mana seniman-seniman pribumi

hanya memainkan peranan yang kecil selama masa penjajahan.

Usaha-Usaha dalam Mengembangkan Kehidupan Budaya di Medan oleh Pemerintah

Dalam suasana revolusi di Medan, serupa dengan di pusat pemerintahan di Jawa dan berbagai daerah lain, gerakan kesenian dilatarbelakangi oleh tujuan mempertahankan kemerdekaan. Dalam suasana tersebut lahirlah lagu-lagu yang bertemakan perjuangan seperti Butet, Meriam Tomong, Erkata Bedil, Piso Surit, dan Inang Sarge. Seni drama juga dipentaskan di front-front untuk menghibur para pemuda yang turut andil dalam perjuangan. (Suwondo, 1978, hlm. 159).

Pertengahan 1950-an dalam dunia literatur, Medan dikenal sebagai ibu kota *pulp fiction*¹. Percetakan swasta di Medan telah ada sejak kuartal pertama abad ke-20 dan sejak awal telah melayani pasar. Sastra yang paling banyak dibaca adalah fiksi populer yang menceritakan tentang perampokan, pembunuhan, penyelundupan, cinta, dan seks. Genre-genre tersebut banyak diminati terutama di kalangan pemuda. Literatur yang serius hampir tidak mendapatkan pasarnya di Medan (Plomp, 2012, hlm. 377).

Marije Plomp (2012) dalam tulisannya tentang kehidupan budaya di Medan, membagi karakter budaya di Medan menjadi budaya populer atau *pop culture* yang dikonsumsi oleh massa dan budaya tinggi yang serius atau kebudayaan nasional yang sedang berkembang. Kedua elemen budaya itu membuat Kota Medan

¹ Buku tentang karakter dan peristiwa fiksi yang dicetak dalam jumlah besar dan dimaksudkan untuk dibaca banyak orang. Namun, karya tersebut tidak

dianggap berkualitas baik (sumber: <https://dictionary.cambridge.org/>)

memiliki kehidupan budaya yang dinamis meskipun budaya populer lah yang lebih banyak dikonsumsi rakyat banyak. Hanya terdapat sebagian kecil saja masyarakat yang meminati seni lukis dan sastra Indonesia modern (Plomp, 2012, hlm. 385). Untuk memopulerkan seni tersebut ke dalam masyarakat, pemerintah dengan instrumennya turut andil dalam menyebarkan kesadaran seni tersebut. Menurut *Sumatra Utara Membangun* (1976, hlm. 632), sebelum Repelita I (Orde Baru) pembinaan kebudayaan dan kesenian dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi, golongan, ataupun suku. Campur tangan dan perhatian pemerintah sedikit sekali, baik dalam pengarahan, bimbingan, ataupun sarana. Bantuan materiil yang diberikan juga relatif kecil. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena kondisi keadaan yang baru merdeka. Namun, sejak awal usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kehidupan seni telah dilaksanakan.

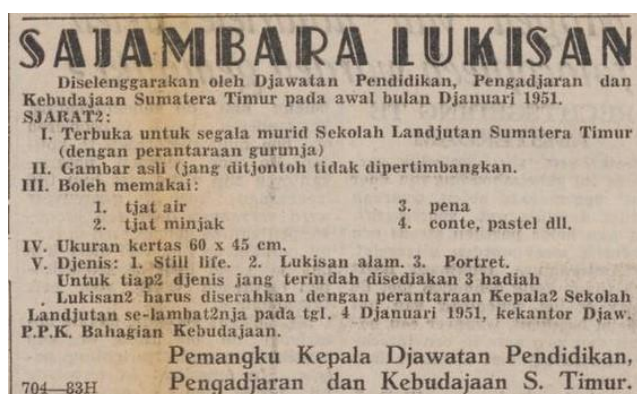
Usaha dalam memajukan dan membangun seni dan budaya di Sumatra Utara diperankan Jawatan Kebudayaan yang merupakan bagian dari Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Jawatan ini dibagi menjadi empat wilayah dengan ciri khas kebudayaan daerah, yaitu daerah kebudayaan Batak, daerah kebudayaan Aceh, daerah kebudayaan Melayu, dan daerah kebudayaan Persisir. Dalam menjalankan tugasnya, Jawatan membagi tugasnya pada lima sektor, yaitu kesenian daerah dan umum, bahasa daerah dan Indonesia, purbakala, makam pahlawan sebelum 1945, dokumentasi sejarah dan arsip negara, dan seni bela diri (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 719).

Untuk merealisasikan kebudayaan nasional dalam bagian kesenian daerah, terdapat tarian dan lagu Melayu yang disebarkan dengan nama Serampang Duabelas. Nyanyian di daerah Tapanuli yang diciptakan oleh komponis Guru Nahun Sitomorang dan nyanyian Karo ciptaan komponis Jaga Depari mulai populer dan menarik perhatian. Komponis Cornel Simanjuntuk yang kerap menciptakan lagu-lagu bertemakan perjuangan diperingati dengan banyaknya yang menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Lily Suheyri dan Saaba, B.Y Supardi banyak menciptakan lagu-lagu Melayu modern (Suwondo, 1978, hlm. 160).

Dalam ranah seni rupa, Sumatra Utara bisa dibidang masih dibelakang bila dibandingkan dengan perkembangan di Jawa. Kementerian Penerangan memberikan gambaran tentang kondisi yang dekaden kehidupan seni rupa bagi kaum pribumi. Sejak masa Hindia Belanda pelajaran menggambar selalu dianaktirikan mulai dari sekolah rendah hingga atas. Seorang yang memiliki bakat dalam bidang seni rupa, tetapi buruk dalam pelajaran lainnya akan didepak dari bangku sekolah. Orang-orang yang memiliki kemampuan seni rupa ini paling beruntung hanya menjadi pembuat gambar reklame atau membuat potret untuk dijual. Bagi mereka yang mampu membuat lukisan tetap tidak akan mendapatkan kepuasan komersial. Bagi pemuda Sumatra Utara yang mempunyai bakat seni rupa biasanya sehabis Sekolah Rendah atau Hollandsch Inlandsche School (HIS) hanya akan pergi ke sekolah Indonesisch Nederlandsche School (INS) Kayu Tanam, di Sumatra Barat, Padang. Akademi Seni Rupa Indonesia di Yogyakarta yang menerima tamatan SMA belum

mendapatkan peminat bagi pemuda Sumatra Utara. (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 723).

Dalam memajukan kehidupan budaya dalam ranah seni rupa, program yang dianggap tepat untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan sayembara melukis sekali setahun untuk Sekolah Lanjutan sehingga minat untuk melukis dapat digerakkan kembali pada pelajar-pelajar, melakukan pameran hasil sayembara Sekolah Lanjutan tersebut agar menarik perhatian pelajar umum, membantu mengadakan pameran dari pelukis atau perkumpulan-perkumpulan pelukis, dan mengadakan pameran lukisan dari luar Sumatra Utara untuk dapat dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai daerah tersebut. Menjelang tiap akhir tahun sejak 1950 telah diadakan sayembara melukis di seluruh Sekolah Lanjutan yang mana peminatnya cukup besar. Misalnya, pada sayembara pada 1952, untuk SMP terdapat 272 karya yang masuk, sedangkan SMA terdapat 138 karya (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 724).



Gambar 1. Iklan sayembara lukisan. Sumber: *Het nieuwsblad voor Sumatra* 06/12/1950)

Usaha-usaha lain adalah dengan melakukan ceramah tentang melukis, prosa, dan puisi

dengan menggunakan perekam suara, menyampaikan risalah dan majalah-majalah tentang melukis, dan memutar film pendek tentang melukis. Semua itu dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perjalanan keliling daerah. Ditambah lagi, terdapat pameran yang diselenggarakan pada September 1952 oleh Kusnadi yang mengadakan pameran pelukis muda Jawa di Medan yang bertujuan agar para pelukis Sumatra Utara mendapatkan gambaran tentang kemajuan seni rupa di Jawa. (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 725).

Dalam menyebarkan kesadaran kehidupan seni, khususnya seni rupa, eksistensi kelompok seniman ASRI 45 menjadi penting di Medan karena mereka adalah satu-satunya kelompok yang aktif dalam kegiatan seni rupa sejak awal kemerdekaan.² Karena itulah mendukung dan bekerja sama dengan ASRI 45 menjadi penting bagi pemerintah dan Kementerian PP dan K. Revolusi nasional yang telah menjungkirbalikkan relasi sosial yang sebelumnya berdampak pada ruang-ruang publik di Medan, membuat perkataan seorang pekerja kebun pada masa kolonial, Ladislao Szekely (1984, hlm. 46) bahwa “tidak usah dikatakan lagi bahwa hotel, club, dan restoran orang kulit putih tidak terbuka bagi kulit berwarna” tidak berarti lagi. Setelah merdeka, ASRI 45 kerap mengadakan pameran-pameran di gedung yang ketika masa kolonial merupakan tempat bagi kaum kulit putih tersebut.

Perkumpulan seni rupa tersebut yang didirikan oleh Daoed Joesoef yang kelak menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru, Hasan Siregar, Ismail Suleman, Husein

² Kelompok seni yang terkenal selanjutnya baru berdiri pada 18 Februari 1967 dengan nama

Simpaian Seniman Seni Rupa Indonesia (SIMPASSRI) (Evita, 2017, hlm. 131).

Enas, serta Ismail Daulay menjadi awal perjalanan perkembangan seni rupa di Medan (Evita, 2017, hlm. 130). Pada masa revolusi nasional, panggung kesenian “diambil alih” oleh pribumi dan digunakan untuk tujuan-tujuan revolusioner dan pembangunan bangsa. Menurut T.Z Anwar, perwakilan dari Kementerian PP dan K Sumatra Timur, ASRI 45 didirikan pada 30 September 1945 sebagai bagian dari Departemen Seni dan Pengembangan Rakyat, Komite Nasional Medan. Tujuan didirikan perkumpulan ini ada empat, yaitu meningkatkan kualitas seni rupa di Indonesia, memberikan apresiasi sosial untuk pekerjaan pelukis, memperkuat ikatan di antara pelukis, dan memperkuat posisi Republik Indonesia. Kelompok ini menyelenggarakan pameran pertama kali di akhir tahun 1945, pameran kedua pada Agustus 1946 di Siantar, dan pameran ketiga pada Oktober 1949 (“Indonesische schilders exposeren te Medan,” 1950).

Seniman-seniman ASRI 45 memainkan peranan dalam masa revolusi. Mereka membuat poster-poster perjuangan dan saat keadaan relatif lebih aman melakukan pameran di Lapangan Merdeka dan Hotel de Boer (Ekoprawoto dkk., 2007, hlm. 21). Hotel de Boer yang merupakan simbol rekreasi orang-orang kulit putih yang sebelumnya belum pernah pameran diselenggarakan, kecuali pameran yang dilaksanakan komunitas Eropa digunakan sebagai tempat untuk para seniman pribumi menunjukkan karya mereka dan memopulerkan kehidupan budaya di Medan.

Pada 1949, ASRI 45 mengadakan pameran dari 26 Oktober sampai 2 November di Medan Hotel. Lukisan-lukisan yang dipamerkan adalah

karya seniman-seniman terkenal seperti Sudjojono, Affandi, Salim, dan Henk Ngantung. Terdapat lebih dari 60 lukisan dan sketsa yang dipamerkan. Tujuan dari diselenggarakannya pameran ini adalah untuk merangsang minat masyarakat terhadap seni lukis Indonesia (“Indonesische schilders exposeren te Medan,” 1949). Dari penyelenggaraan pameran tersebut terlihat adanya tokoh-tokoh yang memiliki perhatian pada seni lukis pribumi. Seperti ketua pameran Dr. R. M. Dzulham, Ismail Daulay sebagai sekretaris, Ibu Joesoef sebagai bendahara. Susunan anggota adalah Ibu Dzulham, Hasan Djafar, R. Aula dan Irawan Irsan dan Abdul Wahab sebagai patron.

Kemudian pameran lain dilaksanakan pada 15 sampai 22 November 1950 oleh ASRI 45 di bawah naungan Kementerian PP dan K di Grand Hotel Medan. Dikabarkan bahwa terdapat banyak minat dalam pameran yang menyajikan 60 lukisan dan sketsa di mana 20 lukisan merupakan karya pelukis terkenal Hasan Djafar (“Indonesische schilders exposeren te Medan,” 1950; “Schilderijentoonstelling,” 1950). Pemerintah juga menaungi pameran pada akhir Januari 1953 yang memamerkan karya-karya dari Ismail Daulay, M Hasan Djafar, Tino Saleh, Tjolan dan seniman-seniman ASRI 45 lainnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara. Dalam pameran ini pemerintah memberi ASRI 45 dana sebesar Rp2.000. Diharapkan dengan diadakannya pameran, para pelukis yang tidak produktif mendapatkan dorongan untuk berkarya. Pameran tersebut mendapatkan banyak perhatian dari para pengunjung yang kebanyakan adalah pelajar (“Schilderijen Expositie ASRI V,” 1953).

Pekan Olahraga Nasional (PON) ketiga yang dilaksanakan di Medan pada 1953 juga turut dimeriahkan oleh ASRI 45. Mereka mengadakan pameran fotografi yang kontestannya terbuka untuk umum melalui sayembara dan hasilnya dipamerkan dalam pasar malam PON yang dibuka pada 18 Juli. Kemudian dilanjutkan oleh pameran lukisan pada 18 September di Medan Hotel yang diikuti oleh 21 pelukis Indonesia ("Fototentoonstelling," 1954; "Pameran Seni Foto," 1953; "Schilderijenexpositie," 1953).

Dalam ranah seni musik, terdapat beberapa perkembangan yang dapat dilihat. Sejak akhir 1951 S. Michaeloff di Medan memberi kursus menyanyi kepada pelajar sekolah guru (S.G.A) yang diberikan empat kali dalam seminggu dengan biaya oleh pemerintah sebesar Rp400. Diharapkan para calon guru tersebut memberikan dampak di kemudian hari ketika telah menjadi guru. RRI (Radio Republik Indonesia) di Medan memberikan ruang bagi perwakilan Jawatan Kebudayaan dua kali dalam sebulan untuk berceramah tentang kebudayaan. Ceramah tidak hanya dilakukan oleh Jawatan, tetapi juga dilakukan oleh para seniman dan para sastrawan. RRI menjadi instrumen yang efisien dalam memopulerkan kehidupan seni (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 726–728). Selain ceramah kebudayaan yang diberikan oleh pemerintah, terdapat program lain seperti acara musik. RRI kerap dikunjungi oleh penyanyi, paduan suara, dan band populer. Selain musik, juga terdapat program sastra dan pembacaan puisi yang sangat populer (Plomp, 2012, hlm. 377).

Meskipun begitu, dalam pertunjukan seni suara dan tari sukar sekali terlihat, meskipun ada, hanya yang berhubungan dengan adat yang

diadakan pada waktu tertentu. Latihan-latihan yang dapat meningkatkan kualitas pertunjukan tidak terlihat, sehingga sukar didapat keindahannya. Untuk menarik perhatian seni pertunjukan, Kepala Daerah Tapanuli Utara meminta dana kepada Kementerian untuk membeli alat-alat musik daerah sebesar Rp10.000. Bila dibandingkan dengan Seni Rupa yang hanya memiliki satu perkumpulan (ASRI 45) saja sampai pada 1953 ataupun perkumpulan seni sastra yang hanya tiga, untuk seni suara/tari/drama di Sumatra Timur terdapat lima puluh perkumpulan. Kebanyakan perkumpulan tersebut merupakan kelompok seni daerah yang digunakan sebagai instrumen mata pencaharian (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 728).

Kelompok yang juga perlu diperhatikan dalam kehidupan seni di Medan selain ASRI 45 adalah Jajasan Budaja. *Het nieuwsblad voor Sumatra* (1951) menyebut kelompok ini sebagai "kunstkring" pribumi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kehidupan seni pribumi. Pandangan itu selaras kedekatan yang terjalin karena kerja sama yang beberapa kali dijalankan antara Jajasan Budaja dan Delische Kunstkring dan juga program seni multidisiplin yang mereka naungi. Setidaknya Jajasan Budaja kerap menaungi kegiatan kesenian seperti pertunjukan drama, tari, pembacaan puisi, pemutaran film, pameran seni rupa, hingga ceramah umum.

Selama 1952, Jajasan Budaja mendapatkan dana sebesar Rp500 setiap bulan dari Jawatan Kebudayaan (*Republik Indonesia: Propinsi Sumatra Utara*, 1953, hlm. 728). Pada 14 November di tahun tersebut diadakan pertunjukan kesenian daerah di Balai Peradjudit. Terdapat tarian dari berbagai daerah seperti

Tapanuli, Aceh, Minangkabau, Melayu, Manipuri (India) yang dibawakan oleh Raden Adjeng Trisutji Djulham dengan gaya Jawa, musik dari Orkes Terang Bulan, dan deklamasi dari Hazman Pasaribu ("Geslaagde avond van moderne Indonesische kunst," 1952).

Keadaan pada 1950 merupakan awal masa perpecahan politik dan juga kesenian di Indonesia. Lahirnya Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang memiliki kedekatan dengan Partai Komunis Indonesia mulai mewarnai kehidupan kebudayaan di Indonesia, tidak terlepas di Medan.³ Ide dasar Lekra adalah bahwa tujuan kesenian adalah mengabdikan kepada rakyat yang berarti membuat kesenian sebagai gerakan dan kekuatan politik. Bakri Siregar, seorang tokoh sastrawan Lekra di Medan berpendapat bahwa kesusastraan Indonesia harus memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia dan bukan menjadikan hasil-hasil sastra sebagai barang mewah untuk kepentingan satu golongan kecil saja (Ismail, 1972, hlm. 26–27).

Di tengah gerakan kebudayaan ini ASRI 45 tetap menjadi kelompok kesenian yang netral. Hal tersebutlah yang kemungkinan membuat pemerintah tetap mendukung kegiatan-kegiatan ASRI 45, seperti lembaga-lembaga kebudayaan netral lainnya. Ekoprawoto, dkk (2007, hlm. 24–25) berpendapat bahwa ASRI 45 cenderung mengambil sikap apatis terhadap dunia politik. Mereka berpendapat bahwa seni tidak dapat dicampuradukkan dengan politik. Gaya lukisan seniman-seniman ASRI 45 juga condong pada naturalistis. Selain keengganan para perupa,

pada tahun 50-an beberapa elemen kesenian enggan bergabung kepada Lekra. Meskipun demikian, kehidupan seni di Medan sebelum awal 60-an belum terpolarisasi secara politik. Terdapat hubungan yang hangat antara para seniman dalam melakukan kegiatan kebudayaan terlepas terdapat pandangan politik yang berbeda di antara mereka. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana Pramoedya Ananta Toer dapat memberikan kuliah di sekolah guru di Medan yang antikomunis (Plomp, 2012, hlm. 391).

Dalam perkembangan pendidikan formal yang berkaitan dengan kebudayaan dan seni, berbeda dengan di Yogyakarta yang telah berdiri akademi seni pada 1950 ataupun Balai Pendidikan Universitas Guru Gambar di bawah Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia di Bandung yang berdiri pada 1947 (sekarang Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB) (Damajani, 2009, hlm. 119). Di Medan pendirian pendidikan formal seni cukup terlambat. Pendidikan tinggi yang ditujukan untuk mencetak guru gambar baru berdiri pada 1968 dengan didirikannya Jurusan Seni Rupa di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (Ekoprawoto dkk., 2007, hlm. 48). Sedangkan, pendidikan tinggi paling awal di Sumatra Utara dan Medan, yaitu Universitas Sumatra Utara (USU), baru membuka jurusan sastra pada 1965 setelah dibentuk pada 1952 dengan fakultas pertamanya, yaitu kedokteran (Lubis, 2004, hlm. 16).

³ Lekra yang berdiri pada 17 Agustus 1950 mendirikan cabang di Medan pada 1955 dengan sekretaris pertamanya Bakri Siregar. Setelah itu

cabang di Ashan berdiri pada 1957, di Tanjung Balai pada 1958, dan di Siantar pada 1959 (Mehaga, 2012, hlm. 68).

KESIMPULAN

Memopulerkan kehidupan seni merupakan tugas yang berkelanjutan oleh pemerintah dimulai sejak dicapainya kemerdekaan. Secara historis, realisasi tersebut telah tercermin oleh bagaimana pemerintah sejak masa revolusi telah bekerja sama dan membantu para seniman, baik secara individu, maupun kelompok seni. Bagaimana pentingnya persoalan budaya dibuktikan oleh keterlibatan dalam Kongres Kebudayaan pada 1948 yang diadakan ketika tengah mempertahankan kemerdekaan dan kongres-kongres dalam bidang budaya lainnya. Pendirian kampus kesenian seperti Akademi Seni Rupa Indonesia pada 1950 yang juga merupakan salah satu hasil diskusi dalam Kongres Kebudayaan memberikan gambaran akan seriusnya pemerintah terhadap regenerasi seniman dan guru-guru gambar.

Di Sumatra Utara dan khususnya Medan memiliki tantangan tersendiri dalam menyebarkan kesadaran seni karena wilayahnya yang jauh dari pusat kebudayaan nasional, yaitu Jakarta. Namun, hubungan antara pemerintah dan kehidupan budaya telah terjalin sejak awal kemerdekaan. ASRI 45 yang merupakan kelompok seniman seni rupa terhubung dengan pemerintah, layaknya kelompok-kelompok seniman di Yogyakarta, karena melakukan perjuangan kemerdekaan melalui jalur kesenian. Setelah pengakuan kemerdekaan pun, pemerintah tetap menjalin hubungan dengan ASRI 45, karena dianggap satu-satunya kelompok seniman seni rupa yang aktif.

Dengan demikian pemerintah turut andil dalam mewarnai dan memberi pengaruh pada kehidupan budaya di Medan di tengah-tengah budaya populer yang berkembang secara massal

dan lebih organik. Meskipun tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyebarkan kesadaran kesenian dan kebudayaan nasional sampai dengan akhir 1959 di Medan. Namun, ceramah dan sosialisasi seni, pelaksanaan sayembara, mengadakan pameran, serta memberi bantuan finansial terhadap kelompok seni dan kebudayaan yang dilakukan pemerintah merupakan sebuah awal dari menjalankan program Pasal 32 UUD yang kontinuitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan, A. (2008). *Perkembangan Seni Lukis sampai Persagi di Batavia, 1900-1942*. Jakarta: Galeri Nasional Indonesia.
- Burhan, M. A. (2004). *Seni Lukis Indonesia Periode 1940-1960: Suatu Pengantar*. Dalam E. Supriyanto & J. Kristanto (Ed.), *Perjalanan Seni Lukis Indonesia: Koleksi Bentara Budaya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Burhan, M. A. (2013). *Seni lukis Indonesia: Masa Jepang sampai Lekra*. Surakarta: UNS press.
- Damajani, R. D. (Ed.). (2009). *Institut Teknologi Bandung: Informasi Umum Program Studi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Ekoprawoto, A., Hartini, S., & Mulyono. (2007). *Sejarah Seni Rupa Sumatra Utara: Kajian Kehidupan Seni Rupa di Medan Tahun 1945-2005* (I. D. Wanti, Ed.). Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- HP, S., Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ismail, Y. (1972). *Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kejatuhan Lekra di Indonesia*. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusnadi. (1990). *Periode Revolusi Fisik Kemerdekaan*. Dalam M. Kusumaatmadja &

- M. Agusta (Ed.), *Perjalanan Seni Rupa Indonesia: Dari Zaman Prasejarah hingga Masa Kini* (hlm. 93–101). Jakarta: Panitia Pameran KIAS 1990-1991.
- Lubis, C. P. (2004). *Pendidikan Tinggi dan Sejarah Perkembangan Universitas Sumatera Utara*.
- Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara. (1953). Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Seni Rupa Indonesia dan Pembinaannya. (1978). Jakarta: Kesenian Departemen P dan K.
- Spanjaard, H. (2018). *Cita-cita Seni Lukis Indonesia Modern 1900-1995: Sebuah Kreasi Kultural Nasional*. Yogyakarta: Ombak.
- Sumatra Utara Membangun. (1976). Medan: Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
- Supardi, N. (2013). *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suwondo, B. (1978). *Sejarah Daerah Sumatera Utara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Szekely, L. (1984). *Tropic Fever: The Adventure of a Planter in Sumatra*. Singapore: Oxford University Press.
- Geslaagde avond van moderne Indonesische kunst. (1952, November 15). *Het nieuwsblad voor Sumatra*.
- Indonesische schilders exposeren te Medan. (1949, Oktober 19). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Indonesische schilders exposeren te Medan. (1950, November 17). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Pameran Seni Foto. (1953, Juni 4). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Saleh, B. (1956, Juni). *Kebudayaan Nasional. Kebudayaan-Kebudayaan Daerah, dan Tata Negara Indonesia*. Indonesia: *Madjalah Kebudayaan*, 242–253.
- Schilderijen Expositie ASRI V. (1953, Januari 17). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Schilderijenexpositie. (1953, September 19). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Schilderijententoonstelling. (1950, November 9). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.
- Toneelvoorstelling Jajasan Budaja. (1951, November 13). *Het nieuwsblad voor Sumatra*.

Artikel, Skripsi dan Tesis

- Banindro, B. S. (2019). Daya Gagas Poster dalam Pergerakan dan Kebebasan Revolusi Indonesia 1945 - 1965. *Ars: Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 21(1), 73–86. <https://doi.org/10.24821/ars.v21i1.2873>
- Evita, F. (2017). *Narasi Simbolik Karya Seni Rupa Tiga Seniman Medan* (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Marzali, A. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. *Humaniora*, 26, 251–265.
- Mehaga, A. (2012). *Peran Lekra dalam Membentuk Kehidupan Budaya di Medan (1950 -1966)* (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.

Surat Kabar dan Majalah

- Fototentoonstelling. (1954, Juni 30). *Het Nieuwsblad voor Sumatra*.